



PERSAINGAN KEKUASAAN ANTARA INDIA DAN CINA: DARI KEKUASAAN MILITER SAMPAI DENGAN KONFLIK SIBER

Refika Febrianti¹, Abubakar Eby Hara², Bagus Sigit Sunarko³

^{1,2,3}Departemen Hubungan Internasional, Universitas Jember, Indonesia;

¹refikafebrianti99@gmail.com, ²eby-hara.fisip@unej.ac.id, ³sigit.fisip@unej.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the development of power competition between China and India from military competition to cyberspace and the reasons why India in 2020 expanded this conflict area to cyberspace. This expansion of competition is marked by India's ban on Chinese mobile applications. The research was conducted using a qualitative research approach and literature study methods as well as the theory of Struggle for Power, Cyber power and cyber Sovereignty. The discussion of this paper shows the main reason why India brings conflict to cyberspace by banning Chinese mobile application was because India had to restrain China's rising dominance in cyber power. The ban was come under a longstanding power and influence rivalry of both countries. India is tend to left behind and suffered several defeats in conventional military competition with China. Afterward, the cyber rivalry allows India to have an extensive opportunity in restraining China's power.

Keywords: *China, cyber sovereignty, India, cyber conflict, struggle for power*

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan persaingan kekuasaan antara Cina dan India dari persaingan militer hingga merambah ke wilayah siber dan alasan mengapa India pada tahun 2020 memperluas wilayah konflik ini ke wilayah siber. Perluasan persaingan ini ditandai dengan pelarangan oleh India terhadap aplikasi *mobile* Cina. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kepustakaan serta teori *struggle for power* dan *cyber sovereignty*. Hasil penelitian menemukan bahwa alasan utama India memblokir aplikasi Cina adalah karena India melihat perlunya membendung dominasi Cina yang semakin menguat dalam *cyber power*. Pemblokiran itu tidak terlepas dari persaingan pengaruh dan kekuatan kedua negara yang sudah lama. Dalam persaingan kekuatan militer konvensional dengan Cina, India cenderung tertinggal dan mengalami beberapa kekalahan. Persaingan kekuatan ke arena siber memungkinkan India mempunyai ruang yang lebih besar untuk menghambat keunggulan Cina.

Kata Kunci: Cina, India, kedaulatan siber, konflik siber, perebutan kekuasaan

Pendahuluan

Pada tahun 2020, India secara resmi melarang aplikasi internet Cina untuk beroperasi di negaranya. Pemblokiran pertama kali ditetapkan oleh Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India (MeitY) pada Juni 2020 dengan melampirkan daftar 59 aplikasi Cina yang diblokir. Selanjutnya pada September 2020, MeitY kembali memblokir 118 aplikasi Cina termasuk aplikasi populer seperti Tiktok, WeChat, dan PUBG Mobile (Ministry of Electronics & IT India, 2020). Tercatat selama tahun 2020, India telah melarang sejumlah 220 aplikasi Cina untuk beroperasi di negaranya.

Hal ini menarik perhatian, karena aplikasi seluler seringkali dianggap sesuatu yang netral. Siapa saja dan negara mana saja bisa menggunakannya dengan bebas. Tentu ada resiko, tetapi pada umumnya masyarakat di dunia menyambut kemudahan kemajuan teknologi ini. Memang ada pemerintahan yang melarang aplikasi tertentu seperti yang dilakukan oleh Donald Trump yang melarang tujuh aplikasi Cina seperti Alipay, QQ Wallet dan WeChat Pay, tetapi tujuannya lebih pada perang dagang dan pengganti Trump yaitu Joe Biden tidak terlalu *concern* dengan hal ini (Cambelle, 2020).

Secara umum, perkembangan teknologi dan informasi di era global telah membuat dunia internasional menerima secara terbuka aplikasi seluler (*mobile application*). Aplikasi seluler sendiri merupakan keseluruhan perangkat lunak yang beroperasi pada perangkat seluler dan melakukan tugas-tugas tertentu (Islam dkk, 2010). Kegunaan yang dimiliki diantaranya adalah untuk menelepon, mengirim pesan, menjelajah internet, komunikasi jejaring sosial, video, audio, game dan fasilitas berbasis internet lainnya. Dengan kemudahan penggunaan dan keragaman fungsi, aplikasi seluler banyak digunakan oleh pengguna internet sekaligus menjadi sektor yang banyak dikembangkan oleh negara- negara di dunia.

Cina menjadi salah satu negara yang turut mengembangkan sektor aplikasi selulernya. Beberapa aplikasi Cina bahkan mendapatkan popularitas yang cukup tinggi di pasar global seperti Tiktok, yaitu aplikasi video pendek yang telah diunduh lebih dari satu miliar di 150 negara di dunia (Fannin, 2019). Selain itu juga terdapat WeChat yang merupakan aplikasi perpesanan yang tidak hanya digunakan di Cina sendiri, tetapi kini mulai banyak digunakan di negara lain.

Seperti negara lain, sebelum pemblokiran, India merupakan salah satu negara yang memiliki minat tinggi terhadap aplikasi Cina. Dibuktikan dengan sebanyak 44 dari 100 aplikasi seluler yang paling banyak diunduh di India pada tahun 2018 merupakan buatan Cina (Pranav dkk, 2020). Hingga di tahun 2019 Tiktok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di India dengan total 611 juta unduhan, melampaui Facebook yang merupakan aplikasi buatan Amerika Serikat (Briskman, 2019). Keragaman fungsi serta keunikannya membuat aplikasi Cina kemudian banyak diminati di kalangan masyarakat India.

Selain bermanfaat untuk keseharian pengguna, aplikasi Cina juga memberikan keuntungan bagi India. Seperti di bidang ekonomi digital, perusahaan-perusahaan induk aplikasi Cina seperti ByteDance, Alibaba, Tencent dan Baidu turut menanamkan modal ventura kepada 92 startup India berbasis teknologi (Bhandari dkk., 2020). Sebagai mana mulai banyak berkembang, modal ventura berbentuk investasi yang memberi pembiayaan dan penyertaan modal ke dalam perusahaan swasta yang kemudian dijadikan sebagai rekan atau pasangan usaha di dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Modal yang diberikan berbentuk uang tunai kemudian bisa ditukarkan ke dalam sejumlah saham dan bisa ditukarkan kembali ke perusahaan pasangan usaha tersebut (Alpha JWC Ventures, 2019). Dengan pemberian modal ini, ekosistem teknologi India kemudian berkembang dan dapat bersaing dengan *startup* negara lain di level global.

Berdasarkan pemaparan di atas, kebijakan pemblokiran oleh India cukup kontradiktif apabila melihat fakta bahwa India merupakan salah satu negara yang memiliki minat tinggi terhadap aplikasi Cina. Selain itu berbagai keuntungan yang didapatkan oleh India dari keberadaan aplikasi Cina menjadikan kebijakan pemblokiran bukanlah sesuatu yang seharusnya dipilih oleh India. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait alasan India melakukan pemblokiran aplikasi Cina di tahun 2020.

Dalam artikel ini peneliti berasumsi bahwa pemblokiran ini berkaitan dengan upaya India untuk membendung keunggulan Cina dalam persaingan kekuasaan antara kedua negara yang telah berlangsung sejak lama. Dalam studi literatur ditemukan bahwa persaingan kekuasaan antara India dan Cina berlangsung pada aspek militer konvensional. Dalam studi literatur tentang persaingan militer konvensional kedua

negara (Avdaliani, 2021; Cenderakasih, 2020; Gokhale, 2021; Nurrahma, 2020; Sandi, 2020), India sering tertinggal dari Cina dan mengalami kekalahan dalam berbagai bentrok di perbatasan. Kekalahan pertama India atas Cina tercatat dalam sejarah Perang Sino-India tahun 1962. Kemudian disusul dengan kekalahan lain dalam konfrontasi militer terbaru di Lembah Galwan tahun 2020 yang mengorbankan 20 tentara India.

Belum ditemukannya titik penyelesaian dalam konflik militer konvensional kemudian membentuk realitas persaingan di aspek lainnya bagi India dan Cina. Salah satunya dalam aspek aplikasi seluler yang melibatkan ruang siber, aplikasi Cina mulai menguasai India yang kemudian diindikasikan terjadi penguasaan data pengguna secara ilegal oleh pemerintah Cina. Pemblokiran aplikasi ini bisa dilihat sebagai upaya India untuk menahan laju penguasaan ruang siber yang juga mulai dilakukan Cina di India. Pemblokiran itu dilakukan untuk memastikan bahwa India bisa mempertahankan data penggunanya di ruang siber. Dengan menggunakan pendekatan realisme, kasus ini adalah contoh yang tepat mengenai perebutan kekuatan antarnegara yang menjadi salah satu hakekat dari hubungan internasional. Hanya bila dulu wilayah *struggle for power* meliputi persaingan persenjataan secara konvensional, maka sekarang dia mulai merambah ke wilayah siber.

Untuk menjelaskan bagaimana pemblokiran aplikasi dapat menjadi bagian dari persaingan kekuasaan antara India dan Cina, maka artikel ini dibagi menjadi enam bagian. Bagian pertama akan mengulas teori-teori yang digunakan dalam artikel ini. Bagian kedua membahas metode penelitian. Bagian ketiga membahas persaingan militer konvensional antara India dan Cina yang tidak jarang berakhir dengan bentrok di wilayah perbatasan. Selanjutnya, di bagian keempat akan membahas perbandingan kekuatan militer yang dimiliki India dan Cina untuk mengetahui daya saing masing-masing negara. Kemudian bagian kelima akan membahas terkait perubahan arah persaingan kedua negara, dari yang awalnya bersifat konvensional kini semakin meluas ke wilayah siber. Terakhir, di bagian keenam akan dibahas upaya India untuk membendung kekuasaan Cina di ruang siber melalui pemblokiran aplikasi seluler Cina.

Teori Power: Hard-Power, Soft-Power dan Cyber Power

Untuk menganalisis penelitian ini diperlukan suatu kerangka pemikiran teoritis untuk memetakan pembahasan-pembahasan secara jernih. Teori *struggle for power* digunakan sebagai pandangan awal untuk membahas kasus hubungan Cina-India ini (Morgenthau, 1978), karena bagaimana pun inti dari hubungan internasional dari perspektif ini adalah persaingan dan perebutan kekuasaan. Kemudian kami mencoba melihat bagaimana perkembangan pemahaman tentang *power* telah berkembang dan sekaligus bagaimana *struggle for power* juga mengalami pergeseran makna ke arah yang lebih kompleks. Perkembangan itu antara lain melahirkan perbedaan antara *hard-power* dengan *soft-power*. Perkembangan mutakhir adalah munculnya *cyber power* yang memberi makna tersendiri bagi pemaknaan *power*.

Teori *struggle for power* berangkat dari pemikiran realisme yang menekankan sisi kompetitif dan konflikual hubungan internasional. Realisme sendiri pertama kali berkembang setelah Perang Dunia II tetapi akar pemikirannya dapat ditemukan dalam beberapa tulisan sejarah umat manusia (Antunes & Camisao, 2017: 15–18). Seperti tulisan milik Thucydides terkait Perang Peloponnesia, *The Art of War* karya SunTzu, *Leviathan* milik Hobbes dan *The Prince* karya milik Machiavelli (Chairil, 2013). Tulisan-tulisan tersebut mengindikasikan bahwa manusia haus akan kekuasaan politik dan ingin mendominasi satu sama lain. Asumsi itu kemudian menjadi inspirasi bagi pendekatan realisme dengan elaborasi lebih lanjut.

Memasuki abad ke-20 terdapat salah satu pemikir realisme terkemuka yaitu Morgenthau. Nama Morgenthau cukup dikenal karena kemampuannya dalam membentuk realisme politik yang semula hanya merupakan pemikiran yang tersebar menjadi sebuah perspektif yang utuh dan praktis. Morgenthau (1991: 33) memandang bahwa politik merupakan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atas manusia dan apapun yang menjadi tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya. Pemikiran ini merupakan perkembangan dari asumsi dasar Thomas Hobbes sebagai pemikir realisme klasik yang menganggap manusia sebagai makhluk yang selalu berjuang untuk mendapatkan kekuasaan (Thivet, 2008: 1). Asumsi ini berkembang dan menjadi salah satu rujukan dalam studi Hubungan Internasional (Tambunan, 2010).

Dasar pemikiran tersebut kemudian menjelaskan bahwa perilaku negara pada dasarnya adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau *struggle for power*. Keinginan untuk mencapai kekuasaan menjadi dasar pola perilaku dan interaksi antar negara. Keinginan utama untuk mendominasi merupakan unsur yang mendorong negara-negara untuk memperebutkan kekuasaan di kancah politik internasional. Melalui kekuasaan yang dimiliki, negara akan menggunakannya untuk mencapai kepentingan nasional, baik untuk memperoleh harga diri (*prestige*), wilayah, keamanan, persuasi, *reward*, ancaman dan kekerasan melalui militer ataupun sanksi ekonomi (Morgenthau, 1954).

Dalam pengertian Morgenthau ini dan para penganut realisme umumnya, *power* ini didefinisikan sebagai kekuatan militer yang juga kemudian disebut dengan *hard power* (yang digunakan untuk membedakannya dengan ciri *power* lain yang disebut *soft-power*). Kemampuan militer ini menjadi kalkulasi utama untuk menentukan keseimbangan kekuatan. Perubahan konstelasi kekuatan militer akan melahirkan dilemma keamanan yang mendorong peningkatan kekuatan dari negara lainnya. Dalam konteks tersebut, India dan Cina sejak abad ke-19 telah terlibat dalam persaingan kekuasaan. Persaingan kedua negara awalnya bersifat konvensional yaitu berupa peningkatan kekuatan militer di wilayah sengketa perbatasan.

Namun dalam perkembangannya, *power* dan praktek *struggle for power* mempunyai dimensi lain. Nye misalnya membedakan antara *hard power* untuk merujuk kepada pengertian kekuatan militer dan *soft power* sebagai kekuatan persuasi. *Soft power* memiliki berbagai aspek yang menunjukkan keunggulan negara di luar kekuatan militer seperti keunggulan sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem pengetahuan dan nilai. Kemampuan suatu negara untuk meyakinkan negara lain akan keunggulan *soft power*-nya dianggap sebagai *power* yang kuat. Bila suatu negara bisa menggabungkan kedua *power* ini, menurut Nye, maka negara ini memiliki *smart power* (Nye, 2009).

Dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, negara-negara kini mengenal kekuatan siber (*cyber power*). Bila *hard-power* dan *soft-power* umumnya dimiliki oleh negara-negara kekuatan besar, maka *cyber-power* bisa dimiliki oleh negara-negara baik kecil maupun besar. Bahkan *non-state actors* juga bisa menguasai kekuatan siber ini. Sebelum membahas

bagaimana persaingan perebutan kuasa antara Cina dan India yang kini merambah ke ruang siber berupa penguasaan data yang salah satunya melibatkan aplikasi seluler, berikut akan diuraikan konsep *cyber-power* ini. Meluasnya arah persaingan antara India dan Cina menunjukkan bahwa dasar perilaku negara adalah keinginan untuk memperoleh kekuasaan dan saling mendominasi.

Kekuatan Siber dan Kedaulatan Siber (*Cyber Power and Cyber Sovereignty*)

Teori kedua yang digunakan adalah kekuatan siber dan kaitannya dengan kedaulatan siber atau *cyber sovereignty* yang mulai muncul sejak dikenalnya istilah ruang siber. Walaupun penguasaan atau kedaulatan mutlak terhadap ruang siber tidak mungkin dilakukan, tetapi tiap negara selalu berusaha untuk menguasai ruang siber mereka agar tidak dikuasai secara mutlak oleh negara lain. Negara-negara mengembangkan berbagai cara untuk mengamankan ruang siber mereka termasuk bekerjasama dengan negara lain (Sembodho, 2019: 1).

Menurut Nye kekuatan tergantung pada konteks, dan pertumbuhan cepat ruang siber adalah konteks baru yang penting dalam politik dunia. Dalam konteks sekarang Nye menjelaskan tumbuhnya kekuatan siber ini dengan cepat tergantung kepada kemampuan dan penguasaan teknologi oleh suatu negara, orang atau kelompok orang tertentu. Nye mendefinisikan kekuatan siber sebagai “kemampuan untuk menggunakan ruang siber untuk menciptakan keuntungan dan memengaruhi peristiwa di lingkungan operasional lain dan di seluruh instrumen kekuasaan” (Nye, 2010).

Sifat kekuatan siber yang tidak terlalu mahal seperti kekuatan militer, anonimitas dan perbedaan dalam kerentanan membuat aktor yang lebih lemah dalam dunia internasional bisa mempunyai kemampuan untuk melawan negara yang kuat secara militer namun rentan atau tidak memiliki kekuatan dan perlindungan siber yang baik. Ini terjadi dalam banyak kasus perentasan dan serangan siber yang dilakukan Korea Utara terhadap Amerika misalnya dan Cina terhadap Amerika. Yang jelas menurut Nye, negara dengan kekuatan besar pun tidak dapat lagi menguasai wilayah siber ini seperti kemampuan mereka menguasai wilayah laut atau udara (Nye, 2010). Karena sifatnya yang demikian, maka seperti akan diuraikan lebih lanjut pada bagian akhir paper ini, India, sebagai kekuatan yang lebih lemah secara militer daripada Cina,

mencoba menggunakan wilayah siber ini untuk membendung dominasi Cina yang semakin kuat dewasa ini di dunia dan khususnya di India dan kawasan Asia Selatan.

Ruang siber sendiri mencakup keseluruhan jaringan komunikasi, pangkalan data serta sumber informasi yang terintegrasi secara virtual dan global. Karakteristik yang dimiliki oleh ruang siber memungkinkan pengguna untuk dapat berkomunikasi dengan menyamarkan identitasnya dan tidak dibatasi dengan wilayah (Liaropoulos, 2013: 21). Dengan karakteristiknya yang tidak dibatasi wilayah (*borderless*) menjadikan keamanan tidak melekat di dalam ruang siber (Sembodho, 2019: 1). Dengan demikian, data dan informasi yang terintegrasi di dalamnya berpotensi untuk dikuasai oleh pihak lain.

Data yang terintegrasi dalam ruang siber memiliki pengaruh penting bagi penggunaannya. Bahkan muncul istilah baru yaitu “*data is a new oil*” atau data adalah minyak baru. Seperti halnya minyak, data menjadi sumber daya yang tidak dapat habis dan menjadi komoditas bagi pemiliknya (Haupt M, 2016). Hal ini dikarenakan data mampu menyimpan aktivitas pengguna, tidak terbatas pada aktivitas yang bernilai ekonomi saja tetapi juga sosial dan budaya (Gupta & Sony, 2021: 69–70). Dengan demikian, data berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana baru untuk menjalankan kekuasaan dan perlu diperjelas terkait siapa pemilikinya.

Begitu juga kehidupan suatu negara yang bergantung terhadap keberadaan data di ruang siber. Hal ini dikarenakan beberapa infrastruktur penting seperti perbankan, keuangan, perminyakan, gas, listrik, air dan transportasi, seluruhnya terintegrasi dengan jaringan internet (Franzese, 2009). Artinya, data dan informasi dari infrastruktur tersebut mengandung nilai ekonomi, sosial, budaya dan bahkan militer yang berpengaruh bagi kelangsungan hidup negara. Dengan memahami pentingnya suatu data yang diikuti oleh kerentanannya, menjadikan ruang siber kini hadir sebagai domain persaingan baru bagi negara-negara setelah daratan, laut, udara dan ruang angkasa.

Untuk mencegah dampak dari karakteristik ruang siber yang *borderless* tersebut, negara mulai memasukkan konsep kedaulatan (*sovereignty*) ke dalam ruang siber (Liaropoulos, 2013: 22). Dalam hubungan internasional, kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan atas teritorial yang berbeda. Kedaulatan siber juga berangkat dari konsep tersebut. Dengan adanya kedaulatan siber, negara berupaya untuk membentuk atau

membatasi wilayah kekuasaannya di ruang siber. Tujuannya adalah untuk mengontrol data serta informasi dalam batas domestiknya (Moharana, 2018: 246). Tidak lain, tujuan akhirnya adalah untuk menghindari terjadinya penguasaan data oleh negara lain maupun entitas lain.

Kedaulatan siber memberikan negara kekuasaan untuk mengontrol ruang sibernya. Baik untuk tujuan politik, ekonomi, budaya maupun teknologi. Kedaulatan siber juga melibatkan jaringan siber yang berdaulat dari suatu negara. Dimana otoritas berhak untuk melakukan filterisasi data, baik dengan cara melakukan sensor ataupun memblokir data yang beredar di dalam wilayahnya (Moharana, 2018: 247). Dengan berkembangnya internet, kedaulatan siber seharusnya menjadi kebutuhan bagi negara-negara untuk memastikan keamanan internal dan kepentingan strategisnya. Terutama karena kini persaingan negara dan urusan geopolitik berlangsung di ruang siber (Liaropoulos, 2013: 23).

Selain itu dalam berbagai analisis juga sering dibedakan beberapa istilah persaingan siber seperti *cyber attack*, *cyber crime* dan *cyber warfare*. Ketiga istilah tersebut memiliki definisi serta tujuannya masing-masing. *Cyber attack* sendiri dipahami sebagai metode yang digunakan untuk melakukan serangan dengan menggunakan teknologi komputer dan internet. Sementara itu, *cyber crime* didefinisikan sebagai tindak kejahatan pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Kemudian *cyber warfare* merupakan bentuk operasi siber baik untuk menyerang ataupun bertahan yang sifatnya merusak dan menghancurkan target operasi (Suharto & Apriyani, 2021:102–104).

Tindakan pemblokiran menunjukkan bagaimana India dalam menggunakan kedaulatan sibernya. Pemerintah India bertindak sebagai otoritas tertinggi untuk mengontrol data dalam batas domestiknya. Dalam hal ini, kontrol ditujukan untuk mencegah terjadinya penguasaan data oleh aplikasi Cina. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak dapat digolongkan atas dasar adanya serangan di ketiga konsepsi perang (*cyber attack*, *cyber crime* dan *cyber warfare*), tetapi bisa dilihat sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya tiga aspek tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Dalam menjelaskan alasan India melakukan pemblokiran terhadap aplikasi Cina, peneliti menganalisisnya secara eksplanatif untuk mencari jawaban dan alasan atas fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan sehingga teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber literatur seperti buku, laporan penelitian terdahulu, jurnal dan laporan dari pihak kredibel. Langkah pertama adalah pengumpulan data melalui hasil pengamatan milik orang lain (*secondary data*), kemudian data-data tersebut dibaca, ditelaah secara mendalam dan dikelompokkan sesuai kebutuhan. Untuk menguji keabsahan data-data tersebut peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan juga membandingkan dengan sumber-sumber lain untuk membuktikan validitas data yang telah ditemukan. Langkah selanjutnya, peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh agar menghasilkan analisis yang kuat sehingga ditemukan pola-pola yang memperkuat kerangka teori yang ada.

Hasil dan Diskusi

Persaingan Konvensional Antara India dan Cina

India dan Cina merupakan dua negara di Asia Selatan yang saling berebut pengaruh sejak lama. Keduanya merupakan negara yang mempunyai peradaban tua dan merasa bangga terhadap warisan peradaban itu. Keduanya merupakan negara ‘raksasa’ karena memiliki wilayah terluas dan penduduk terbanyak di Asia (*United Nations*, 2019). Selain itu kepemilikan tenaga nuklir serta kekuatan militer yang terus berkembang menjadikan India dan Cina sebagai negara yang berpengaruh di Asia (Shrivastava, 2016). Potensi-potensi kekuatan nasional yang demikian ini menjadikan India dan Cina memandang satu sama lain sebagai tantangan strategis untuk mendapatkan posisi dalam tatanan global dan regional di Asia Selatan. Belakangan ini India bergabung dengan koalisi *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad), yaitu forum dialog informal antara India, Amerika Serikat, Jepang dan Australia yang bekerja pada agenda masalah keamanan, ekonomi dan kesehatan di wilayah Indo-Pasifik. India melalui Quad ini

bersama Amerika Serikat, Jepang dan Australia untuk menghadapi kebangkitan Cina secara militer dan ekonomi di dunia (Rasheed, 2020).

Adanya anggapan sebagai tantangan strategis bagi satu sama lain membuat hubungan India dan Cina kemudian banyak diwarnai oleh persaingan. Persaingan kedua negara dimulai dari berbagai tingkat yaitu dari tingkat bilateral, regional maupun global. Selain itu persaingan antar India dan Cina juga meliputi berbagai domain mulai dari teritorial, geopolitik, ekonomi, ideologis, teknologi hingga *soft power* (Madan, 2021). Konflik perbatasan menjadi konflik terpanjang bagi kedua negara yang dimulai sejak abad ke 19 hingga saat ini. Konflik perbatasan ini sekaligus menjadi akar kemunculan persaingan lain yang menjadi realitas bagi hubungan kedua negara saat ini.

Terdapat kecurigaan yang besar antara satu negara dengan negara lainnya. India melihat Cina memiliki ambisi untuk menguasai atau mempengaruhi negara-negara Asia Selatan yang secara tradisional merupakan daerah lingkungan pengaruh India sejak lama. Persaingan kedua negara itu telah menyebabkan beberapa bentrokan di perbatasan yang memakan korban jiwa di kedua pihak. Dalam bentrokan tersebut beberapa negara tetangga India juga terlibat. India ingin memastikan bahwa tetangga-tetangganya di Asia Selatan tidak jatuh dalam pengaruh Cina. Kami melihat ada beberapa kasus yang menunjukkan sengitnya persaingan kekuasaan kedua negara yang terutama meliputi persaingan militer konvensional.

Perang Sino-Indian (1962)

Perang Sino-Indian menjadi konfrontasi fisik pertama sekaligus yang terbesar dalam sejarah India dan Cina. Konflik bermula ketika Cina membangun jalan sepanjang 750 mil melintasi Aksai Chin yang menghubungkan Tibet dan Xinjiang, termasuk 112 mil di atas wilayah yang menjadi klaim India (Sandi, 2020). India kemudian memprotes pembangunan Cina tersebut karena dianggap telah melanggar salah satu prinsip Panchsheel Agreement tahun 1954 dimana kedua negara perlu saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan masing-masing. Aksi klaim tersebut kemudian berakhir dengan bentrok antar masing-masing tentara di wilayah perbatasan.

Sejak saat itu hubungan India dan Cina kian memburuk. Tahun 1959 menjadi pertempuran pertama bagi kedua negara di garis McMahon. Setelah terjadinya

pertempuran, kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan negosiasi agar mencapai kesepakatan yang utuh. Tetapi negosiasi itu tidak membuahkan hasil karena kedua negara menolak untuk menarik pasukan militernya masing-masing dari kawasan sengketa. Tidak adanya titik temu antara India dan Cina semakin menciptakan ketegangan militer masing-masing negara di wilayah Aksai Chin.

Ketegangan terus berlanjut hingga 20 Oktober 1962 menjadi puncaknya. Militer Cina melakukan serangan besar-besaran terhadap wilayah timur maupun barat India. Serangan yang sifatnya mendadak dan minimnya persiapan India, menyebabkan India tidak berdaya dalam melawan Cina. Cina sebagai pihak yang unggul akhirnya berhasil menguasai Aksai Chin di sektor barat dan berhasil menyerang pasukan militer India yang berada di selatan sungai Namka. Keberhasilan serangannya membuat Cina mengeluarkan status gencatan senjata dan menawarkan agar dilakukan perundingan untuk menentukan batas wilayah kepada India.

India yang kala itu dikalahkan oleh Cina kemudian menolak dilakukannya perundingan dan akan melanjutkan sengketa perbatasan dengan jalan militer (Maxwell, 1999). India melakukan serangan balik kepada pasukan militer Cina pada 14 November 1962. Pada perang kedua ini India pada awalnya berhasil menguasai kota Walong yang merupakan wilayah Cina. Tetapi di akhir peperangan, India tetap mengalami kekalahan. Akhirnya Cina kembali menjadi pihak yang menang dan berhasil meluaskan keamanan militernya di kawasan sengketa. Sehingga pada 22 November 1962, Cina mengeluarkan status gencatan senjata secara sepihak yang menandai berakhirnya perang dengan India sebagai pihak yang dikalahkan.

Konflik Dataran Tinggi Doklam (2017)

Berakhirnya perang Sino-Indian pada tahun 1962 berdampak pada renggangnya hubungan diplomatik antara India dan Cina. Beberapa kerjasama dalam bidang militer berhasil dijalin oleh India dan Cina kala itu sebagai upaya rekonsiliasi. Tetapi berbagai perundingan yang diadakan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan tidak membuahkan hasil karena kedua negara terus menekankan klaim atas teritorialnya masing-masing (Calvin, 1984). Sehingga hubungan kedua negara setelah Perang Sino-Indian cenderung stagnan yang dipenuhi oleh konfrontasi militer dan pertukaran diplomatik yang tidak produktif.

Salah satu konfrontasi militer yang terjadi antara India dan Cina pasca perang adalah Konflik Doklam di tahun 2017. Sengketa wilayah dataran tinggi Doklam sebenarnya merupakan konflik yang dialami oleh Cina dan Bhutan. Tetapi India turut melibatkan diri dalam konflik ini dikarenakan Bhutan yang menjadi sekutu dari India sejak tahun 2007 (Ministry of External Affairs (MEA) India, 2007). Selain itu menurut India, aktivitas militer Cina di daerah Doklam dapat mengancam keamanan wilayah timur lautnya (Miglani, 2017). Dengan adanya campur tangan India menandakan bahwa konflik Doklam di tahun 2017 sebenarnya merupakan perpanjangan konflik perbatasan dari India dan Cina yang belum selesai. Walaupun begitu, Bhutan juga diuntungkan dari segi militer dalam melawan Cina karena militer India yang lebih unggul daripada miliknya.

Sengketa bermula ketika Cina membangun jalan raya di Doklam menuju kamp tentara Bhutan di Zompelri (Ministry of Foreign Royal Government of Bhutan, 2017). Pembangunan ini membawa kekhawatiran bagi Bhutan karena dapat mengancam stabilitas keamanan wilayahnya. Setelah mengetahui pembangunan jalan raya oleh Cina, India kemudian menempatkan militernya untuk mengawasi Cina agar tidak melewati batas teritorial wilayah Bhutan (Mardiana, 2020). Selain itu India juga memasuki kawasan Cina yang berada di dataran tinggi Doklam secara ilegal yang kemudian oleh Cina dianggap mengganggu proses pembangunan jalan di kawasan tersebut.

Ketegangan militer di perbatasan kemudian membuat India dan Cina terus menambah pasukan militernya. Sebanyak 300 pasukan militer kedua negara saling berhadapan dengan hanya terpisah jarak sekitar 150 meter saja (Hardoko, 2017). Ketegangan militer kemudian berakhir dengan aksi saling serang berupa pelemparan batu di kawasan Danau Pangong (Kertopati, 2017). Danau Pangong sendiri merupakan bagian dari wilayah dataran tinggi Doklam yang sedang menjadi wilayah konflik antara Cina, Bhutan dan India. Selain serangan fisik, India dan Cina juga saling menyerang menggunakan media lokal dimana keduanya saling mencera satu sama lain di berbagai media.

Untuk meredakan ketegangan yang semakin memanas, India dan Cina sepakat untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan) menjadi jembatan bagi

dilakukannya negosiasi antara India dan Cina karena keduanya hadir sebagai anggota (Rejeki, 2019). Setelah ketegangan militer yang terjadi di dataran tinggi Doklam selama 73 hari, India dan Cina akhirnya mengalami kebuntuan militer dan sepakat untuk menarik pasukan militer masing-masing dari wilayah perbatasan (Miglani, 2017). Ini kemudian menandakan berakhirnya ketegangan militer kedua negara di dataran Doklam.

Konflik Lembah Galwan (2020)

India dan Cina pada tahun 2020 kembali dihadapkan pada ketegangan militer dan diplomatik terkait wilayah perbatasan. Konflik ini terjadi di Garis Kontrol Aktual atau *Line of Actual Control (LAC)*, yakni garis demarkasi yang memisahkan wilayah yang dikuasai India dengan wilayah yang dikuasai Cina, yang terletak di Lembah Galwan, Ladakh. (Express, 2020) Lembah Galwan terletak di Kashmir dan sejak lama telah menjadi wilayah sengketa antara India, Pakistan dan Cina. Dari konflik ini, setidaknya sebanyak dua puluh tentara India terbunuh akibat konfrontasi ini, salah satunya adalah perwira militer India. Ketegangan militer ini menjadi peristiwa pertama yang berujung pada pertumpahan darah sejak Perang Sino-Indian di tahun 1962.

Konflik bermula ketika India di tahun 2019 membangun sebuah jalan panjang beberapa ratus kilometer menuju ke Daulat Beg Odi yang merupakan tempat pendaratan tertinggi di dunia. Pembangunan jalan oleh India menjadi ancaman bagi Cina karena apabila terjadi konflik di perbatasan, India dapat dengan cepat menggerakkan kekuatan militernya melalui jalan tersebut. Untuk mengimbangi kekuatan India, pasukan militer Cina pada Mei 2020 kemudian mendirikan tenda, menggali parit perlindungan dan memindahkan sejumlah peralatan militer besar ke wilayah yang diklaim sebagai bagian dari India (BBC News, 2020). Aksi Cina tersebut menuai ketidaksepakatan dari India karena Cina dianggap melewati batas teritorialnya.

Hingga pada 6 Juni 2020 India dan Cina sepakat melakukan proses de-eskalasi untuk mengurangi ketegangan militer yang ada. Proses de-eskalasi diwakili oleh pejabat militer masing-masing negara. Dari proses de-eskalasi tersebut, kedua negara sepakat untuk mengambil langkah-langkah relevan menuju perdamaian (Cenderakasih, 2020). Cina kemudian menarik pasukannya dari LAC sebagai langkah untuk mengurangi ketegangan.

Untuk memastikan penarikan pasukan Cina dari LAC, pasukan patroli India kemudian melakukan pengecekan langsung ke wilayah tersebut. Namun kedua pasukan militer berakhir dengan konfrontasi fisik dengan menggunakan senjata tajam. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina yaitu Zhao Lijian, India adalah pihak pertama yang melakukan provokasi dan menyerang tentara Cina terlebih dahulu. Walaupun konfrontasi fisik ini tidak mengorbankan pasukan militer Cina, tetapi sejumlah 20 tentara India terbunuh dan lainnya mengalami luka-luka (CNN Indonesia, 2020). Kekalahan India dalam konflik ini semakin meningkatkan ketegangan diplomatik dan militer kedua negara.

Perbandingan Kekuatan Militer India dan Cina

Secara historis, India dan Cina telah lama terlibat dalam persaingan konvensional terutama di wilayah yang menjadi sengketa kedua negara. India khususnya menjadi pihak yang sering mengalami kekalahan dan kerugian ketika konfrontasi berlangsung. Perang Sino-India pada tahun 1962 menjadi sejarah awal kekalahan India akibat ketidakmampuannya untuk menyeimbangi kekuatan militer Cina. Selain itu, konfrontasi militer terbaru di Lembah Galwan pada tahun 2020 yang mengorbankan 20 tentara India kian membuktikan betapa rentannya militer India jika dihadapkan dengan militer Cina (Cenderakasih, 2020).

Apabila ditinjau dari segi militer, Cina tampaknya memiliki kapasitas militer yang lebih unggul jika dibandingkan dengan India. Dapat dilihat dari jumlah anggaran militer Cina yang empat kali lebih besar dari India, yaitu sebesar 252 miliar dolar per tahun (Armed Forces, 2021). Cina juga meningkatkan infrastrukturnya di Tibet sejak tahun 1980-an berupa jalur kereta api dan jalur jalan raya yang telah dilengkapi dengan tujuh bandara dataran tinggi di Tibet. Selain itu, Cina juga memiliki sejumlah 157 pesawat tempur, pasukan dan infrastruktur komunikasi serta logistik yang canggih untuk operasi melawan India (Pardesi, 2021). Dengan keunggulan militer yang dimiliki, Cina terus meluaskan dominasi militernya untuk menguasai wilayah perbatasan dengan India.

Sementara itu India sejak tahun 2005 berupaya untuk mengimbangi kapabilitas militernya dengan Cina. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan jaringan jalan dan aktifnya serangkaian lapangan terbang di sepanjang perbatasan Himalaya untuk

operasi melawan Cina. Pada tahun 2013 India juga mengalokasikan anggaran sebesar 15 miliar dolar untuk modernisasi militer serta untuk meningkatkan kemampuan defensif maupun ofensifnya (Pardesi, 2021). Upaya-upaya tersebut menjadi bukti keseriusan India dalam menyaingi militer Cina, walaupun masih tertinggal jauh sebagaimana kekalahan yang dialami India di konflik Lembah Galwan tahun 2020.

Perubahan Arah Persaingan

Tampaknya memang cukup sulit bagi India untuk unggul dalam persaingan militer dengan Cina. Persaingan di aspek militer akan membawa India pada kekalahan yang akhirnya memberikan celah bagi Cina untuk mendominasi wilayahnya. Kekalahan yang terus berulang terjadi tentu saja dapat merugikan India, baik secara teritorial maupun secara *prestige* di kancah politik internasional. Selaras dengan asumsi Morgenthau bahwa keinginan untuk mencapai kekuasaan menjadi dasar pola perilaku dan interaksi antar negara (Morgenthau, 1954). Begitu juga dengan India yang memiliki tujuan untuk mendominasi dan mendapatkan kekuasaan lebih dari yang Cina miliki.

India yang tertinggal dalam aspek militernya kemudian mencari arena persaingan baru dimana potensi untuk menang dari Cina lebih besar. Ruang siber menjadi salah satu arena yang dipilih oleh India untuk bersaing dengan Cina. Ruang siber sendiri memang berpotensi untuk dijadikan domain persaingan baru setelah daratan, laut, udara dan ruang angkasa karena karakteristiknya yang terbuka (*borderless*). Dengan karakteristik yang terbuka maka rentan terjadi persaingan untuk saling menguasai data satu sama lain di ruang siber.

Langkah awal yang dipilih India untuk menguasai ruang siber adalah dengan memblokir aplikasi seluler buatan Cina di negaranya. Memang dalam kenyataannya belum ada *cyber warfare*, *cybercrime* atau *cyber-attack* seperti umumnya dikhawatirkan dalam *cyber war*. Namun, keberadaan aplikasi seluler Cina yang cukup mendominasi dianggap sebagai ancaman karena potensi untuk menguasai data India di ruang siber semakin besar. Untuk mencegah meluasnya kekuasaan Cina tersebut, India kemudian menggunakan kekuatan sibernya yang diwujudkan melalui kebijakan pemblokiran aplikasi Cina di bawah Peraturan Teknologi Informasi 2009 bagian 69A Undang-Undang TI India.

Upaya India Untuk Menguasai Ruang Siber

Pelarangan aplikasi Cina ditetapkan oleh Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India (MeitY) secara bertahap. Tahap pertama dirilis pada bulan Juni 2020 melalui press rilis MeitY yang sekaligus melampirkan daftar 59 aplikasi seluler Cina yang diblokir. Kemudian pemblokiran tahap kedua dilakukan pada bulan September 2020. Melalui press rilisnya, MeitY melarang sejumlah 118 aplikasi seluler Cina seperti Tiktok, PUBG Mobile, WeChat dll untuk beroperasi di India (Ministry of Electronics & IT India, 2020). Menteri Elektronika dan Teknologi Informasi India, Ravi Shankar Prasad dalam press rilisnya menyatakan:

“We have banned 59 apps for the safety of the country and to safeguard people’s digital data... We won’t compromise on the issue of data security... We won’t compromise on the issue of national safety and security. India knows how to protect its borders and also knows how to carry out a digital strike.” (Kathuria et al., 2015)

Melalui press rilis dan pidato Ravi Shankar Prasad, aplikasi Cina dianggap telah mencuri dan mentransmisikan data pengguna secara ilegal ke server di luar India. Server tersebut dicurigai merupakan server yang berbasis di negara asal aplikasi-aplikasi tersebut yaitu Cina. India menilai bahwa kemungkinan adanya penguasaan data oleh Cina dapat mengancam kedaulatan dan integritas negaranya. Oleh karena itu sebelum penguasaan data oleh Cina semakin meluas, India terlebih dahulu memblokir aplikasi Cina dari ruang sibernya.

Dengan adanya kekhawatiran akan penguasaan data, beberapa ahli siber internasional kemudian melakukan investigasi terhadap salah satu aplikasi Cina yang paling banyak dicurigai yaitu Tiktok. Salah satunya yaitu seorang peneliti keamanan asal Prancis bernama Robert yang turut menginvestigasi Tiktok. Robert telah melakukan analisis kode aplikasi Tiktok dan tidak menemukan suatu keganjalan di dalamnya (Philips, 2020). Robert juga menjelaskan bahwa Tiktok memiliki cara kerja penyimpanan data pengguna yang sama dengan kebanyakan aplikasi seluler lainnya, seperti aplikasi buatan Amerika Serikat yaitu Facebook, Twitter dan Instagram (Huaxia, 2020).

Selanjutnya peneliti keamanan siber dari Universitas Toronto juga membedah kode aplikasi Tiktok. Para peneliti menemukan bahwa Tiktok tidak berkomunikasi dengan server manapun yang berbasis di Cina. Data-data pengguna dari luar Cina

tampaknya tidak disimpan langsung di server Cina (Ikeda, 2020). Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa data yang disimpan di server luar Cina dapat diteruskan ke perusahaan induk ByteDance di Beijing yang kemudian tunduk pada aturan intelijen nasional Cina. Dengan begitu, walaupun tampaknya Pemerintah Cina saat ini tidak melakukan penguasaan data tetapi struktur politik Cina memungkinkan hal tersebut terjadi.

Selain itu *Central Intelligence Agency* (CIA) atau Badan Intelijen Pusat milik Amerika Serikat juga dilaporkan telah menyelidiki ancaman keamanan Tiktok. Dalam laporannya tersebut CIA menegaskan tidak ada bukti bahwa otoritas intelijen Cina telah melakukan spionase melalui Tiktok (Ghaffary, 2020). Tetapi dengan adanya Undang-Undang Intelijen Nasional Cina tahun 2017 maka pihak berwenang Cina berpotensi untuk menguasai data pengguna melalui aplikasi tersebut.

Dari beberapa laporan investigasi diatas memang belum ditemukan bukti adanya pencurian data oleh aplikasi Cina. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah struktur politik Cina yang direpresentasikan melalui Undang-Undang Intelijen Nasional Cina pasal 7 tahun 2017 yang menyatakan: *“Any organization or citizen shall support, assist and cooperate with the state intelligence work in accordance with the law, and keep its secrets known to the public. The State protects individuals and organisations that support, assist and cooperate with national intelligence work”* (Mohan, 2020).

Dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap organisasi atau warga negara Cina harus mendukung, membantu dan bekerja sama dengan intelijen negara sesuai dengan hukum dan menjaga rahasianya diketahui publik. Artinya, perusahaan dan organisasi Cina wajib bekerjasama dengan Badan Intelijen Cina dalam kegiatan keamanan, termasuk di dalamnya adalah tindakan spionase. Bagi individu atau perusahaan yang melanggar undang-undang tersebut akan didakwa sebagai tindak kejahatan dan pemberian hukuman penahanan.

Melalui undang-undang tersebut terdapat kemungkinan perusahaan dan organisasi Cina untuk menyerahkan data-data keamanan penggunanya kepada Pemerintah Cina. Dengan begitu, pejabat intelijen Cina memiliki wewenang untuk mengakses data individu maupun organisasi asing yang tertaut dengan aplikasi Cina. Termasuk mengakses data pengguna yang dibatasi seperti catatan pribadi, informasi peralatan komunikasi serta transportasi yang dimiliki oleh individu maupun

perusahaan. Penguasaan data secara ilegal oleh pemerintah Cina akan berdampak bagi individu, perusahaan maupun negara yang informasinya terintegrasi pada aplikasi tersebut.

Negara khususnya akan menjadi pihak yang terdampak secara signifikan apabila penguasaan data pengguna oleh Pemerintah Cina terjadi. Disampaikan oleh Pratama D. Persadha (2020) yang merupakan seorang ahli keamanan siber dari *Communication & Information System Security Research (CISSReC)* bahwa individu mungkin akan merasakan dampaknya secara langsung apabila akun perbankan yang tertaut pada aplikasi seluler diretas. Tetapi negara akan merasakan dampak yang lebih besar karena data pengguna suatu negara berkaitan dengan infrastruktur penting seperti perbankan, keuangan, perminyakan, gas, listrik, air dan transportasi (Franzese, 2009). Dengan ini data pengguna menjadi hal penting bagi negara karena berkaitan dengan keamanan nasional. Sehingga dibutuhkan kekuasaan dan kontrol negara di dalamnya.

Untuk mencegah penguasaan data terjadi maka India melarang aplikasi Cina beroperasi walaupun beberapa kerugian dirasakan oleh India akibat keputusannya sendiri. Salah satunya yaitu terputusnya aliran dana investasi yang diberikan oleh perusahaan aplikasi Cina kepada 92 *start up* India (Bhandari et al., 2020). Seperti Zomato yang merupakan salah satu start up makanan milik India yang telah mendunia, harus kehilangan akses 100 juta dolar dari Ant Financial yang masih menjadi bagian perusahaan dari Alibaba Group. Mengetahui dampak yang dirasakan cukup signifikan bagi ekosistem ekonomi digitalnya, India tetap mengutamakan keutuhan ruang sibernya dari pengaruh kekuasaan Cina.

Simpulan

Persaingan kekuasaan antara Cina dan India telah berlangsung sejak lama. Dalam persaingan itu yang beberapa menyebabkan *clash* di perbatasan, India yang lebih lemah secara militer mengalami kerugian lebih besar daripada Cina. Dengan berkembangnya teknologi informasi, persaingan itu mempunyai konteks baru yaitu wilayah siber. Karena ciri wilayah siber yang tidak terlalu mahal dan bergantung pada kemampuan teknologi negara, India melihat bahwa mereka masih bisa membendung pengaruh Cina yang kini juga mengarah pada dominasi wilayah siber ini. Untuk itu, dalam konteks persaingan siber ini, langkah yang diambil India adalah melakukan

pemblokiran terhadap aplikasi Cina di tahun 2020. India semakin khawatir akan dominasi Cina yang tidak hanya di aspek militer konvensional tetapi juga di wilayah siber.

India dan Cina sejak lama memang telah terlibat dalam persaingan konvensional akibat konflik perbatasan dan militernya. India yang dalam sejarahnya cenderung kalah karena tidak mampu bersaing dengan militer Cina, kemudian mencari arena persaingan baru dengan cara India mencoba membendung pengaruh Cina secara lebih kuat. Ruang siber merupakan satu wilayah yang dirasakan India perlu dipertahankan dalam persaingannya dengan kekuatan Cina. Walaupun belum tentu India mampu mengatasi Cina dalam persaingan dunia siber tetapi langkah ini penting diambil India untuk mengantisipasi kemungkinan serangan siber dari Cina. Pemblokiran aplikasi diambil sebagai langkah pertama India untuk menguasai ruang sibernya dari kekuasaan Cina. Keberadaan aplikasi seluler Cina yang cukup mendominasi dianggap sebagai ancaman karena potensi untuk menguasai data India semakin besar. Untuk mencegah meluasnya kekuasaan Cina tersebut, India mengeluarkan kebijakan pemblokiran aplikasi Cina dibawah Peraturan Teknologi Informasi 2009 bagian 69A Undang-Undang TI India.

Dalam kasus ini, kami juga melihat bahwa teori-teori realisme masih cukup relevan untuk menganalisis hubungan dua negara terutama bila dua negara tersebut mempunyai sejarah permusuhan sejak lama. Persaingan kekuasaan yang terus terjadi meliputi berbagai aspek, kini merambah ke wilayah baru dunia siber dan memperkuat hakekat perebutan kekuasaan yang berlanjut dalam teori-teori realis. India merasa ini merupakan suatu wilayah yang mereka bisa kendalikan untuk melawan Cina. Namun seberapa efektif tindakan India ini memerlukan kajian lebih lanjut, terutama mengingat asumsi India didasari pada kalkulasi penguasaan kedaulatan teritorial, sementara aplikasi-aplikasi ini umumnya tidak mengenal batas teritorial. India bisa saja membatasi aplikasi itu secara resmi, tetapi dalam dunia siber, UU pemblokiran itu masih bisa dilanggar oleh siapapun dengan berbagai teknik. Belum lagi bila nanti ada *cyber-attack* yang dilakukan oleh Cina, apakah India siap menghadapinya? Namun hal-hal terakhir ini memerlukan riset lebih lanjut dan berada di luar lingkup pembahasan paper ini.

Referensi

- Alpha JWC Ventures. (2019). *Apa Itu Venture Capital? Ini Pengertian dan Tujuannya*. Alpha JWC. <https://www.alphajwc.com/id/mengenal-modal-ventura-yang-sangat-bermanfaat-bagi-startup-indonesia/>
- Antunes, S., & Camisao, I. (2017). Realism. *International Relations Theory*. 15–18. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37562-1_5
- Armed Forces. (2021). *Military power of India & China*. Armedforces.Eu.
- Avdaliani, E. (2021). *The India-China Rivalry Undermines the Emergence of a Multipolar World*. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies.
- BBC News. (2020). *Konflik China-India di Lembah Galwan: Beijing sanggah tahan tentara India, namun mengapa kawasan tinggi dan sangat dingin ini diperebutkan?* BBC News.
- Bhandari, A., Fernandes, B., & Agarwal, A. (2020). Chinese Investment in India. *Gateway House: Indian Council on Global Relations* (Vol. 3).
- Calvin, J. B. (1984). *The China-India Border War (1962)*. Marine Corps Command and Staff College.
- Cambelle, C. (2020). *How TikTok Found Itself in the Middle of a U.S.-China Tech War*. Time.
- Cenderakasih, Y. (2020). *Konflik Perbatasan India dan China yang Terus Berulang Sejak Tahun 1914*. Voi.
- Chairil, T. (2013). *Historic Antecedents of Realist IR Theories (1): Thucydides*. International Relations BINUS University.
- CNN Indonesia. (2020). *Kronologi Bentrokan Tentara China dan India di Perbatasan*. CNN Indonesia.
- Fannin, R. (2019). *The Strategy Behind TikTok's Global Rise*. Harvard Business Review.
- Franzese, P. W. (2009). Sovereignty in Cyberspace: Can it exist? *The Air Force Law Review; Maxwell AFB*, 64, 42.
- Ghaffary, S. (2020). *Do you really need to worry about your security on TikTok? Here's what we know*. Vox.
- Gokhale, V. (2021). *The Road from Galwan: The Future of India-China Relations*.
- Gupta, S., & Sony, R. (2021). Quest of Data Colonialism and Cyber Sovereignty: India's Strategic Position in Cyberspace. *Legal Issues in the Digital Age*, 2(2), 68–81. <https://doi.org/10.17323/2713-2749.2021.2.68.81>
- Hadyan, R. (2020). *TikTok dan Sederetan Kontroversi Keamanan Data Penggunanya*. Teknologi Bisnis ID.
- Hardoko, E. (2017). *China Desak India untuk Tarik Pasukan dari Perbatasan*. Kompas.
- Huaxia. (2020). *Xinhua Headlines: Europeans slam U.S. protectionism behind TikTok ban*. Xinhua Net.
- Ikeda, S. (2020). *Is TikTok Really a National Security Threat? New Report From University of Toronto Says No*. CPO Magazine.
- Islam, R., Islam, R., & Mazumder, T. A. (2010). Mobile application and its global impact. *International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS*, 10(06), 72–78. <https://doi.org/107506-0909>
- Jonathan Briskman. (2019). *Top Countries Worldwide for Q2 2019 by App Downloads*.

- Kathuria, R., Chowdhury, S. R., Kedia, M., & Srivastav, S. (2015). *An Inquiry into the Impact of India's App Economy*.
- Kertopati, L. (2017). *Tentara India dan China Bentrok di Himalaya*. CNN.
- Liaropoulos, A. (2013). Exercising State Sovereignty in Cyberspace: An International Cyber-Order under Construction. *Journal of Information Warfare*, 12(2), 19–26.
- Madan, T. (2021). *Major Power Rivalry in South Asia* (Issue 6).
- Mardiana, V. (2020). Krisis Doklam dan Kepentingan Nasional India. *Review of International Relations*, 2(2), 91–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rir.v2i2.17966>
- Maxwell, N. (1999). Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. *Economic and Political Weekly*, 34(15), 905–918.
- Miglani, B. B. S. (2017). *India and China agree to end border standoff*. Reuters.
- Ministry of Electronics & IT India. (2020). *Government Blocks 118 Mobile Apps Which are Prejudicial to Sovereignty and Integrity of India, Defence of India, Security of State and Public Order*.
- Ministry of External Affairs (MEA) India. (2007). *India-Bhutan Friendship Treaty*.
- Ministry of Foreign Royal Government of Bhutan. (2017). Press Release. *Ministry of Foreign Royal Government of Bhutan* (Vol. 8, Issue AUG).
- Mohan, G. (2020). *How China's Intelligence Law of 2017 authorises global tech giants for espionage*. India Today.
- Moharana, K. K. (2018). Cyber-Sovereignty in Indian Context. *Bharati Law Review*, 243–254. <https://doi.org/2457-0567>
- Morgenthau, H. J. (1954). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (K. W. Thompson (ed.); 6th ed.). Peking University Press.
- Morgenthau, H. J. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Morgenthau, H. J. (1991). *Politik antar Bangsa* (Ed. Revisi). Yayasan Obor Indonesia.
- Mukul, P., Mehrotra, K., Aryan, A., & Singh, S. (2022). Stop app: How Chinese companies came to dominate India's digital space. *The Indian Express*.
- Nye, J. S. (2009). Get Smart: Combining Hard and Soft Power. *Foreign Affairs*, 88(4), 160–163. <https://www.jstor.org/stable/20699631>
- Nye, J. S. (2010). *Cyber Power*. <http://belfercenter.org>
- Pardesi, M. S. (2021). India's China strategy under Modi continuity in the management of an asymmetric rivalry. *International Politics*, 0123456789, 27. <https://doi.org/10.1057/s41311-021-00287-3>
- Philips, G. (2020). *Are TikTok and Other Chinese Apps Really Stealing Your Data? Make Use Of*.
- Rasheed, Z. (2020). *What is the Quad and can it counter China's rise?* Aljazeera.
- Rejeki, W. S. (2019). Pengaruh Kepentingan Nasional dan Interdependensi Ekonomi Terhadap Kebijakan Expeditious Disengagement Cina-India pada Krisis Doklam 2017. *Journal of International Relations*, 5(4), 727–733.
- Rekadewi, N. N. (2020). *Analisis Konflik Perbatasan antara India dan China melalui Kacamata Realisme*. Airlangga University.
- Sandi, F. (2020). Perang Sino-India (1962): Polemik Sengketa Perbatasan China-India dalam Sudut Pandang Konstruktivisme. *Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Airlangga*, 1(June).
- Sembodho, K. U. (2019). *Keterbatasan Strategi Deterrence Amerika (The Limitation of United States Deterrence Strategy)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Jember.

- Shrivastava, V. K. (2016). Sino-Indian Boundary Dispute and Indo-Centric Reflections on China's Military Capabilities, thoughts and Options in the Near Future. *Vivekananda International Foundation*. Vivekananda International Foundation.
- Suharto, M. A., & Apriyani, M. N. (2021). Konsep Cyber Attack , Cyber Crime , Dan Cyber Warfare Dalam Aspek Hukum Internasional. *Risalah Hukum*, 17(2), 98–107.
- Tambunan, E. M. (2010). Realisme Politik Morgenthau: Suatu Tinjauan Singkat. *Verity*, vol. 2 no.3 (Realis Morgenthau), 17–26.
- Thivet, D. (2008). Thomas Hobbes : a Philosopher of War or Peace? *British Journal for the History of Philosophy*, Taylor & Francis (Routledge), 16(4), 701–721. <https://doi.org/10.1080/09608780802407407>.
- United Nations. (2019). World Population Prospects 2019. *Department of Economic and Social Affairs*. *World Population Prospects 2019*. (Issue 141).